



MEMBANGUN  
MANUSIA KARYA

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

**LAPORAN TAHUNAN  
TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997**

11  
12  
13  
14  
15

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR  
Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126 (031) Telp. 8280757-8280254  
SURABAYA**



MEMBANGUN  
MANUSIA KARYA



**LAPORAN TAHUNAN  
TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997**



**DEPARTEMEN TENAGA KERJA  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR  
Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126 (031) Telp. 8280757-8280254  
SURABAYA**

## KATA PENGANTAR

Sebagai rangkuman seluruh kegiatan rutin dan pembangunan Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur, disusun Laporan Tahun Anggaran 1996/1997 ini untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 157/M/SJ/1984, tanggal 01 Juni 1984.

Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinis Jawa Timur , yang didalamnya menggambarkan tentang hasil-hasil yang telah dicapai, permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya serta saran-saran.

Buku Laporan ini tersusun berkat kerjasama yang baik antar Unit Kerja dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur.

Namun tetap disadari bahwa laporan Tahunan ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran dari berbagai pihak diperlukan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Surabaya, April 1997

KAKANWIL DEPNAKER

PROVINSI JAWA TIMUR



MOH. SYAUFII SYAMSUDDIN

NIP. : 160008975

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
B A B	I	: PENDAHULUAN	1
B A B	II	: KEGIATAN DAN HASIL YANG DICAPAI	
		1. BAGIAN TATA USAHA	3
		2. BIDANG BINAGRAM	7
		3. BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS	11
		4. BIDANG PENTA KERJA	13
		5. BIDANG HUBIN SYAKER	18
		6. BIDANG PENGAWASAN KK	25
		7. BALAI AKAN	30
		8. BALAI HIPERKES DAN KK	31
		9. KEPANITERAN P4D	33
		10. BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH	35
B A B	II	: PERMASALAHAN DAN HAMBATAN	36
B A B	III	: ANALISA DAN EVALUASI	40
B A B	IV	: KESIMPULAN DAN SARAN	
		A. KESIMPULAN	46
		B. S A R A N	47

## BAB I

### PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor. : Kep 157/M/SJ/1984, tanggal 01 Juni 1984, maka disusunlah Laporan Tahunan 1996/1997 yang meliputi kegiatan Rutin dan Pembangunan di jajaran Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur yang meliputi ; 23 Kandepnaker, 1 Kandisnaker, 7 Balai, 1 Kepaniteraan P4D dan 12 KLIK.

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 1996/1997 ini tetap didasarkan pada kebijaksanaan Depnaker dalam Pelita VI DASAR KARYATAMA, target dan petunjuk-petunjuk yang ada yang ada baik didalam DIP, DIK dan Petunjuk Operasionalnya, maupun petunjuk-petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat. Disamping itu dalam melaksanakan kegiatannya tetap memperhatikan pula hasil dan evaluasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Secara garis besar dapat diutarakan bahwa program dan kegiatan tahun 1996/1997 cukup berhasil sesuai yang direncanakan. Bahkan untuk beberapa hal terjadi penonjolan-penonjolan yang berarti, sebagai gambaran umum dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Realisasi keuangan dan fisik pelaksanaan kegiatan Rutin sampai dengan akhir Tahun Anggaran 1996/1997 ini cukup memadai. Hal ini dapat dilihat alokasi dana sebesar Rp. 10.122.410.000,- telah dapat terealisasi sebesar Rp. 9.618.569.203,- sehingga realisasi fisik pelaksanaan tercapai sebesar 95,02 %
2. Realisasi keuangan dan fisik pelaksanaan Kegiatan Pembangunan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 1996/1997 cukup memadai, karena dari alokasi dana Rp. 12.628.890.000,- telah dapat direalisasi Rp 11.464.474.430,- ( 94,98 %) sedang fisik 99,08 %

Selanjutnya uraian secara lebih rinci dipaparkan dalam bab-bab berikutnya.

Adapun sistematika penyusunan Laporan Tahunan adalah sebagai berikut :

A. KISI	BAB I	:	Pendahuluan
	BAB II	:	Kegiatan dan Hasil yang dicapai
Pada	BAB III	:	Masalah/Hambatan
1. II	BAB IV	:	Evaluasi
2.	BAB V	:	Kesimpulan dan Saran

DISPERPUSIP JATIM

## BAB II

### KEGIATAN DAN HASIL YANG DICAPAI

#### 1. BAGIAN TATA USAHA.

##### A. KEGIATAN RUTIN

Promosi / Mutasi :

1. Jumlah Pegawai Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur :

- Golongan IV sebanyak : 53 orang
- Golongan III sebanyak : 811 orang
- Golongan II sebanyak : 937 orang
- Golongan I sebanyak : 106 orang

Jumlah : 1.907 orang

Dari jumlah tersebut terdaftar pejabat fungsional sebagai berikut :

- Instruktur Latihan Kerja : 448 orang
- Pengawas Ketenagakerjaan : 101 orang
- Litkasayasa : 12 orang

Sedang jumlah Pegawai Teknis Fungsional :

- Pegawai Pengantar Kerja : 69 orang
- Pegawai Perantara : 81 orang

2. Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural : 45 orang terdiri dari :

- Eselon II : 1 orang  $+ 2 = 3$
- Eselon III : 5 orang  $+ 9 + 15 = 29$
- Eselon IV : 33 orang  $+ 11 + 52 = 97$
- Eselon V : 6 orang  $+ 1 = 1$

3. Usul kenaikan Pangkat 570 orang terdiri dari :
  - Golongan II/d kebawah : 128 orang, Realisasi : 128 orang ( 100 %)
  - Golongan III/a keatas : 442 orang, Realisasi : 433 orang ( 97,96 %)
  
4. Pemindahan Pegawai 124 orang terdiri dari :
  - Antar unit dilingkungan Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur : 79 orang
  - Dari luar Propinsi Jawa Timur : 27 orang
  - Keluar Propinsi Jawa Timur : 18 orang
  
5. Pengangkatan Calon PNS menjadi PNS sebanyak : 5 orang terdiri dari :
  - Golongan III : 4 orang
  - Golongan II : - orang
  - Golongan I : 1 orang
  
6. Usulan permintaan Karpeg 17 orang dan realisasinya 15 orang, permintaan Karis/Karsu 77 orang dan realisasinya 55 orang.
  
7. Pelaksanaan Ujian Dinas dan UTPP 2 tahap.
  - Tahap I : Ujian Dinas : 80 orang, Lulus : 80 orang  
 U T P P : 8 orang, Lulus : 8 orang
  - Tahap II : Ujian Dinas : 15 orang, Lulus : - orang (belum ada Pengumuman)  
 U T P P : 2 orang, Lulus : -- orang
  
8. Pengembangan dan Pembinaan :
  - a. Mengikuti Diklat sebanyak : 308 orang
  - b. Tindakan Disiplin Pegawai : 19 orang
    - Tingkat Ringan sebanyak : 8 orang
    - Tingkat Sedang sebanyak : 7 orang
    - Tingkat Berat sebanyak : 4 orang

c. Ijin Cuti Pegawai diberikan kepada : 242 orang.

9. Arus surat selama Tahun Anggaran 1996/1997 telah tercatat sebagai berikut :

NO	JENIS SURAT	MASUK	KELUAR
3.	Surat Biasa	23.464	13.579
2.	Surat Penting	314	58
3.	Surat Rahasia	536	662
4.	Surat Ijin	127	738
5.	S S B	15	7
	J U M L A H	24.456	15.044

Dalam pengelolaan surat menyurat dan ekspedisi telah tercatat surat keluar sebanyak 15.044 buah dengan biaya pengiriman Rp. 3.673.800,-

10. Dana yang diperoleh dari DIK sebesar Rp. 10.122.410.000,- realisasinya sampai akhir Tahun Anggaran 1996/1997 yaitu pada akhir Bulan Maret 1997 Rp. 9.618.569.203,- atau 95,02 % meliputi unit Kanwil, 23 Kandepnaker, 1 Kandisnaker, 7 Balai, 12 KKK dan Kepaniteraan P4D dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN M.A	DANA DALAM DIK (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SIS. DANA (Rp.)
1.	Belanja Pegawai	7.740.445.000,-	7.276.496.022,-	63.948.978,-
2.	Belanja Barang	1.307.773.000,-	1.244.389.870,-	63.383.130,-
3.	Belanja Pemeliharaan	974.993.000,-	1.001.208.561,-	- 26.215.561,-
4.	Belanja Perjalanan	99.199.000,-	96.474.750,-	2.724.250,-
	<b>J U M L A H</b>	10.122.410.000,	9.618.569.203,-	503.840.797,-

**CATATAN :**

Biaya Pemeliharaan tercantum lebih besar realisasinya dibanding pagu dana dalam DIK, hal ini adalah akibat adanya ABT (Anggaran Belanja Tambahan)

11. Pengadaan barang inventaris kantor :

- Kursi besi 87 buah : Rp. 6.882.500,-
- Amplifayer dan Microphone : Rp. 498.900,-
- Pesawat Telephone 2 buah : Rp. 390.000,-
- Kordyn Vertikal Blind 14.25 : Rp. 498.750,-
- AC Split merek National 1 unit : Rp. 3.500.000,-

12. Pemeliharaan Gedung Kantor :

- Pengecatan dinding

**B. KEGIATAN PEMBANGUNAN.**

Pemeliharaan gedung kantor :

1. Pengadaan Peralatan Kantor 23 unit

2. Pembangunan Rumah Jaga 6 M2
3. Perbaikan prasarana lingkungan 1.645 M2
4. Rehabilitasi gedung 1.240 M2
5. Pembuatan Pagar 353 M
6. Renovasi bidang kantor 70 M2

## 2. BIDANG PEMBINAAN PROGRAM.

Sesuai tugas bidang Bina Program adalah melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program, penyusunan informasi ketenagakerjaan daerah, penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah serta evaluasi dan laporan, dimana dalam pelaksanaan kegiatannya ditunjang oleh anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

### A. Kegiatan Rutin :

1. Menyusun dan mengkoordinir pembuatan Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP) dan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dengan unit terkait sebagai bahan Rakorbang Tingkat I Jawa Timur dan mengirimkan hasil Rakorbang ke Pusat. Menyusun dan mengirimkan Lembar Kerja (LK) sebagai bahan konsultasi usulan proyek ke pusat. Dan selanjutnya mengkoordinasi pelaksanaan Usulan dan revisi DIP/PO, DIK/PO tingkat Daerah ke Tingkat Pusat.
2. Menyusun dan mengkoordinir pembuatan Renlaksiat Rutin dan Pembangunan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan tersebut yang meliputi kegiatan dari Bidang/Balai, Kepaniteraan P4D, Kandepnaker dan BLK/KLK. Pada Tahun Anggaran 1996/1997 telah mencapai 100 %.
3. Mengadakan kunjungan ke perusahaan atau instansi pemerintah sebanyak 119 kunjungan tersebut untuk mendapatkan data yang menyangkut ketenagakerjaan. Hasil

1. E  
2
1. E  
2
- 1
4. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan menanggapi surat - surat yang masuk dari BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur serta Instansi terkait. Membuat laporan pertanggung-jawaban Gubernur bidang ketenagakerjaan, Sasaran Pelita, Konsep GBHN dan Penyampaian data ketenagakerjaan pada pihak ke III misalnya Komisi E DPR RI.
  5. Menyusun Buku Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Pelita VI dan PJP II bersama-sama dengan Universitas Airlangga untuk Tahun Anggaran 1996/1997 dibuat sebanyak 25 buku dan ini merupakan penyempurnaan dari buku RTKD Pelita VI yang telah disusun sebelumnya.
  6. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh :
    - Tim Itjen 33 kali, meliputi 33 unit kerja.
    - Tim BPK 1 kali, meliputi -- unit kerja
    - Tim BPKP 2 kali, meliputi 2 unit kerja.
    - Tim Wasmin/Wasop 8 kali, meliputi 12 unit kerja.
    - Jumlah kasus yang masuk melalui PO. Box 5000 Tahun Anggaran 1996/1997 sejumlah 61 buah, sedangkan pada Tahun Anggaran 1995/1996 sejumlah 75 buah. Hal ini berarti mengalami penurunan 18, 66 % yang mana disebabkan karena adanya penerunan kasus perselisihan Industrial dan banyak kasus yang dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat waktu.
  7. Menyelenggarakan Rakerda di Natour Bath Hotel, Tretes dengan peserta terdiri dari Pejabat Eselon II, III, IV,V, Pimpro dan Kakanwil , Kakancab PT Jamsostek (Pesero) se Jawa Timur.

Hasil Rakerda sebagai berikut :

1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan Rutin dan Pembangunan T. A. 1995/1996.
2. Membahas Rencana Kerja untuk Kegiatan Rutin dan Pembangunan T.A. 1996/1997.
3. Menghasilkan Rumusan lain yang bersifat usulan maupun masukan untuk pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan.

Rakorda I : Diselenggarakan di Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur pada Tanggal 18 - 19 Juli 1996, dengan peserta para Pejabat Eselon II, III, IV, Kakanwil, Kakancab PT. Jamsostek (Persero) se Jawa Timur.

Hasil yang dicapai sebagai berikut :

1. Terumuskannya hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan baik Rutin maupun Pembangunan selama kurun waktu Bulan April - Juni 1996 untuk T.A. 1996/1997.
2. Tersusunya program prioritas untuk kurun waktu Bulan Juli - Oktober 1996.

Rakorda II : Diselenggarakan di Hotel Istana di Kab. Nganjuk pada tanggal 14 - 15 Oktober 1996 dengan peserta para pejabat Eselon II, III dan Kakanwil dan Kakancab PT. Jamsostek (Persero) se Jawa Timur.

Adapun Hasil Rakorda tersebut adalah :

1. Terumuskannya hasil evaluasi pelaksanaan Kegiatan baik Rutin maupun Pembangunan selam Triwulan II.
2. Dihasilkan Telaah Staf tentang Pelaksanaan Reformasi Pelatihan di Jawa Timur.
3. Dihasilkan Telaah Staf tentang Pekerja Borongan pada Sektor Perkebunan di Jawa Timur dan Pekerja Borongan Phetet Rokok di Jawa Timur.

Rakor III : Diselenggarakan di Kanwil Departemen Tenaga Kerja Prop. Jawa Timur pada Tanggal 27 Pebruari 1997, dengan peserta para Pejabat Eselon II, III Kakanwil dan Kakancab PT Jamsostek (Persero) se Jawa Timur.

Adapun Rakorda tersebut menghasilkan rumusan sebagai berikut :

1. Dirumuskannya hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Rutin dan Pembangunan selama Triwulan III.
  2. Menghasilkan Telaah Staf tentang Rencana Pelaksanaan Otonomi Daerah (OTODA).
- 
8. Menyelenggarakan Rapim setiap hari Senin, sebagai materi/bahan diperoleh dari hasil rekapitulasi Rapim Kandepnaker se Jawa Timur yang dianggap perlu untuk ditindaklanjuti Kanwil atau Pusat dari Bidang/Balai, Kepaniteraan P4D, dan BLK Surabaya, BLK Singosari, BLK Wonojati dan BLK Sumenep. Hasil dari Rapim tersebut dibuat Notulen dan Laporan untuk dikirim ke Pusat sejumlah 52 Laporan melalui Fax.
  9. Menyelenggarakan Rapat Konsolidasi Penyusunan Program/Proyek Daerah T.A. 1997/1998 untuk Kelompok Wilayah II, dengan peserta seluruh eselon II dari Pusat, III dan Kepala BLK/KLK dalam kelompok wilayah II, tanggal 1 s/d 11 Juli 1996 di Orchid Hotel Batu, Malang.
  10. Menyusun Buku Laporan Bulanan sejumlah 720 buku, Laporan Triwulan sejumlah 180 buku dan Laporan Tahunan sejumlah 60 buku yang berdasarkan hasil rekapitulasi laporan dari Kandepnaker, Bidang/Balai, Kepaniteraan P4D dan BLK/KLK se Jawa Timur serta hasil kunjungan monitoring dan evaluasi.

## B. Kegiatan Pembangunan.

Maksud dan tujuan diadakan kegiatan melalui Bagian Proyek IPTK adalah :

1. Memperluas Lapangan Kerja untuk mengurangi pengangguran.
2. Menyusun kebutuhan Tenaga Kerja dan Komoditi Unggulan.
3. Menyempurnakan sistem dan mekanisasi Informasi Ketenagakerjaan.
4. Merencanakan dan mengevaluasi kegiatan Proyek Pembangunan di tingkat Kanwil.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas dilakukan berbagai kegiatan dengan didukung dana sebesar Rp. 245.672.000,- .

Dari seluruh pelaksanaan kegiatan Pembangunan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian hasil Fisik 96,15 %, Keuangan 88,44 % dan SIAP 11,56 %. Terjadinya SIAP ini dikarenakan pelaksana proyek yang berada di tingkat Kandeptakerj mengalami kesulitan untuk meng - SPJ- kan Mata Anggaran lain-lain dari dana yang di Bintang (diblokir).

## 3. BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

### A. Kegiatan Rutin.

#### 1. Kegiatan Pemagangan.

##### a. Peserta Pelatihan Pemagangan.

Jumlah peserta pemagangan dalam Tahun Anggaran 1996/1997 sebanyak 989 orang dengan perincian sebagai berikut :

- Peserta Pelatihan Magang Standart : 240 orang
- Peserta Pelatihan Non Standart : 749 orang
- Peserta Pelatihan Magang di Jepang : 354 orang

b. Mengadakan Penyuluhan / Pembinaan di 16 BLK/KLK secara periodik dan untuk tahun ini sebanyak 51 kali.

#### 2. Pembinaan Sertifikasi.

a. Dalam Tahun Anggaran 1996/1997 pemberian sertifikasi perijinan LLS ber jumlah 92.Lembaga sedang dalam Tahun Anggaran 1995/1996 jumlah LLS 716 lembaga, hal ini berarti mengalami penurunan sebesar 87,15 % .

Pembinaan LLS/BLKLN secara periodik dalam Tahun Anggaran 1996/1997 sebanyak 166 kali.

- b. Pemberikan akreditasi Swadana pada 88 LLS di Jawa Timur.
  - c. Mengadakan UJK pada Calon Tenaga Kerja sebanyak 334 orang, dan mengadakan UJK bagi peserta latihan LLS sejumlah 25.244 orang, sedakan pada Tahun Anggaran 1995/1996 UJK bagi peserta Latihan LLS mencapai 30.726 orang, ini berarti dalam Tahun ini mengalami penurunan sebesar 17,84 %. Hal tersebut disebabkan beberapa kemungkinan antara lain
    - Penyuluhan kurang intensif.
    - Penyelenggara Latihan kurang melihat arti pentingnya UJK
  - d. Pembinaan terhadap HLLSI (DPD, DPC HLLSI) sebanyak 48 kali
  - e. Mengadakan kerjasama dengan Pihak ke III dalam rangka pelaksanaan Permen 02//1987.
3. Pembinaan Instruktur BLK/KLK/ BPPD sejumlah 448 orang yang meliputi berbagai kejuruan.
  4. Pembinaan Instruktur LLS sejumlah 1.659 orang.
  5. pembinaan Instruktur Perusahaan sejumlah 76 orang.
  6. SKB dengan pihak ke III dapat menyerap dana sebesar Rp. 743.201.506,- dari target yang ditentukan terlaksana 74 %.
  7. Penempatan lulusan BLK/KLK Tahun Anggaran 1996/1997 2.349 orang jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 1995/1996 mengalami penurunan 2 %.

#### B. Kegiatan Pembangunan.

- Pelaksanaan Pelatihan.

Bidang Latihan dan Produktivitas Tenaga Kerja melaksanakan Pelatihan untuk Tahun Anggaran 1996/1997 sejumlah 6.880 orang. Sedangkan pada Tahun Anggaran 1995/1996 sejumlah 7.547 orang berarti dalam kegiatan mengalami penurunan 8,84 % karena disesuaikan dengan dana yang tersedia.

#### 4. BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KERJA.

##### A. Kegiatan Rutin.

##### 1. Informasi Bursa Kerja Terpadu.

##### a. Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja.

Kegiatan Rutin penempatan ditekankan pada penempatan pencari kerja dan pemenuhan Lowongan yang terdaftar melalui prosedur Antar Kerja Umum, Antar Kerja Khusus dan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. Hasil yang telah dicapai sebagai berikut :

##### 1. Antar Kerja Umum.

- Lowongan Terbuka	: 121.353 orang
- Pencaker Aktif	: 357.473 orang
- Penempatan	: 69.832 orang
- Penghapusan Pencaker	: 112.840 orang
- Sisa Pencaker yang belum ditempatkan	: 174.800 orang
- Lowongan yang belum dipenuhi	: 21.656 orang
- Lowongan yang dihapuskan	: 29.576 orang

##### 2. Perijinan Tenaga Kerja Asing.

- TKA Domestik	
Baru	: 37 orang
Perpanjangan	: 270 orang
Pindah Jabatan	: - orang
Jumlah	: 307 orang
- TKWNAP	
Baru	: 562 orang
Perpanjangan	: 378 orang
Pindah Jabatan	: 2 orang
Jumlah	: 942 orang

*Handwritten notes:*  
13  
190106  
192102

b. Penyaluran Tenaga Kerja.

1. Kegiatan Penyaluran Tenaga Kerja ditekankan pada Kegiatan pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (PBJ).

a. Bursa Kerja Khusus (BKK) :

- Jumlah Satuan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang telah mengikuti Pemanduan Bursa Kerja 275 Unit dengan jumlah peserta 529 orang,
- Jumlah Satuan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang telah membentuk Bursa Kerja Khusus 109 Unit dengan jumlah petugas 275 orang.
- Jumlah Lembaga Pelatihan yang telah mengikuti pemanduan Bursa Kerja 47 Unit dengan jumlah peserta 50 orang.
- Jumlah Lembaga Pelatihan yang telah membentuk Bursa Kerja Khusus 22 Unit dengan jumlah petugas 26 orang.
- Jumlah Pencaker Terdaftar di BKK di satuan Pendidikan Menengah dan Tinggi pada 109 Unit berjumlah 54.470 orang.
- Jumlah Lowongan terdaftar di BKK di satuan Pendidikan Menengah dan Tinggi pada 109 Unit berjumlah 5.259 orang.
- Jumlah Penempatan yang terdaftar di BKK di satuan Pendidikan Menengah dan Tinggi pada 109 Unit 5.259 orang
- Jumlah Pencaker yang terdaftar di BKK di satuan Lembaga Pelatihan Kerja pada 22 Unit sebesar 4.1914 orang.
- Jumlah Lowongan yang terdaftar di BKK di satuan Lembaga Pelatihan pada 22 Unit sebesar 413 orang
- Jumlah Penempatan yang terdaftar di BKK di satuan Lembaga Pelatihan pada 22 Unit sebesar 195 orang.

b. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan :

Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan dilaksanakan dengan obyek sasaran kepada :

- Pencari Kerja dalam rangka untuk mengisi lowongan pekerjaan baik AKL, AKAD dan AKAN.
- Pencari kerja yang akan mengikuti latihan ketrampilan, khususnya pelatihan yang dilaksanakan oleh BLK/KLK.
- Siswa sekolah / latihan dalam rangka study lebih lanjut maupun memilih Latihan Kerja.

B. Kegiatan Pembangunan.

1. Kegiatan Proyek Perluasan Lapangan Kerja dan Pengurangan Pengangguran (PLKPP) Propinsi Jawa Timur.

a. Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja.

Sasaran Proyek ditekankan pada pencapaian target pada DIP/PO T.A 1996/1997 melalui kegiatan Penempatan AKL, AKAD, Penempatan Motivator Transmigrasi (PMT), TK - PENCA, Pemanduan Penempatan TK - MUDA melalui kegiatan Penyuluhan Bimbingan Jabatan dan Hubungan Industrial (BJHI) kepada Guru BP, KADIN dan siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang telah membentuk Bursa Kerja Khusus (BKK), Kegiatan Pelatihan Kader Pelatih Ketrampilan Tenaga Kerja Wanita serta Penyuluhan dan Pembinaan bagi Pengguna TKWNAP.

Adapun hasil yang dicapai :

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
a.	AKI	13.750 orang	13.750 orang	100,00
b.	AKAD	15.000 orang	15.000 orang	100,00
c.	PMT	120 orang	106 orang	88,33
d.	TK - PENCA	60 orang	36 orang	60,00
e.	TK Muda BJHI	40 orang	40 orang	100,00
f.	TK Wanita	45 orang	45 orang	100,00
g.	TKWNAP	50 Persh	50 Persh	100,00
h.	AKAN	100.000 orang	45.626 orang	45,63

b. Kegiatan Penyaluran Tenaga Kerja :

Sasaran kegiatan Penyaluran Tenaga Kerja ditekankan pada kegiatan : Informasi Pasar Kerja, Pemanduan Bursa Kerja, Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan serta Analisis Jabatan.

Adapun hasil yang dicapai :

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
a.	IPK (Berita Pasar Kerja)	1.200 buku	1.200 buku	100
b.	Pemanduan Bursa Kerja	30 orang	30 orang	100
c.	Penyuluhan	1.500 orang	2.127 orang	100

Kegiatan Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri dan Perluasan Kerja.

Baik kegiatan Rutin/ Pembangunan yang diarahkan pada upaya perluasan Lapangan Kerja melalui penciptaan kesempatan berusaha bagi angkatan kerja terdidik dalam Tahun Anggaran 1996/1997 ini.

c. Kegiatan Teknologi Tepat Guna.

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	P K B	20 orang	20 orang	100
2.	T P K Sistim paket (13 Unit a 20 orang)	260 orang	260 orang	100
3.	T P K Sistim Kader	25 orang	25 orang	100
4.	T P K Sistim Demplot ( 1 Unit)	20 orang	20 orang	100
5.	Bimbingan Teknis	40 orang	40 orang	100

d. Kegiatan Usaha Mandiri

NO	NAMA PELATIHAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Pemandu Wirausaha	20 orang	20 orang	100
2.	T K M T A3	120 orang	120 orang	100
3.	T K P M P PT	220 orang	220 orang	100
4.	T K P M P B M T	360 orang	360 orang	100

## 5. BIDANG HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN DAN SYARAT KERJA

### A. Kegiatan Rutin

√1. Pendidikan P4 dan H I P.

Pendidikan P4 dan H I P T.A. 1996/1997 sebanyak 100 Angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 14.154 orang. (Lihat Lampiran 1)

√2. Pendidikan H I P.

Kegiatan Pendidikan H I P secara mandiri diarahkan pada perusahaan rawan (klasifikasi kuning dan merah), sampai akhir 1996/1997 kegiatan pendidikan H I P 185 angkatan dengan peserta 15.716 orang. (Lihat Lampiran 2)

3. Gerakan Pembangunan Keluarga Pekerja Sejahtera (GPKPS) di lingkungan Perusahaan

Pembentukan Unit Pengelola P K P S di Perusahaan Tahun Anggaran 1996/1997 telah terbentuk 16 Perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 229 orang.

√4. Pendidikan Lain - Lain (H I P Terpadu)

Pendidikan Lain - Lain (H I P Terpadu) Tahun Anggaran 1996/1997 126 Angkatan dengan jumlah peserta 3.414 orang.

5. Pembentukan dan Pembinaan Sarana H I P dalam T.A. 1996/1997:

a. Pembentukan Unit Kerja SPSI sampai dengan Laporan akhir Tahun Anggaran 1996/1997 sebesar 190 Unit.

b. SPTP yang terbentuk tahun ini sebanyak 95 Unit

c. Penyuluhan dan Pembentukan LKS Bipartit sebanyak 148 Unit.

d. Pembinaan dan Pembentukan Koperasi Karyawan sampai saat ini sebanyak 116 Unit.

e. Pembinaan APINDO di Jawa Timur sampai sekarang mencapai jumlah anggotanya mencapai 1.078 Unit.

6. Kegiatan LKS Tripartit Daerah TK I.

Kegiatan dilaksanakan oleh LKS Tripartit Daerah TK I Jawa Timur :

a. Kegiatan Sekretariat.

Kegiatan Rapat Sekretariat dilaksanakan setiap 2 bulan sekali dalam membahas Pokok - Pokok Pikiran dan masalah ketenagakerjaan di Jawa Timur sebagai bahan masukan dalam sidang pleno Tripartit.

b. Kegiatan Rapat/Sidang Pleno

Kegiatan Rapat/Sidang Pleno dilaksanakan 4 kali dalam setahun, menghasilkan beberapa kesepakatan bersama yaitu :

Kesepakatan Bersama tentang Program Kerja LKS Tripartit Dati I, Penyempurnaan Kriteria Penilaian lomba LKS Tripartit Dati II Teladan, Pedoman terpadu Pencegahan dan Penanggulangan kasus Hubungan Industrial Pancasila, Pembinaan Pembentukan dan Pengembangan LKS Bipartit dan Silaturahmi dialogis antara Muspida dengan masyarakat Industri.

c. Kegiatan Operasional.

Kegiatan Operasional dilaksanakan dalam rangka me-nindaklanjuti kebijaksanaan baik kebijaksanaan lokal maupun nasional.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi antara lain :

1. Melaksanakan Pembinaan pada LKS Tripartit Dati II dengan sasaran pada LKS Tripartit Dati II yang dirasakan kurang/belum berfungsi.
2. Melaksanakan pemilihan Pekerja Teladan Tingkat Propinsi guna memilih 3 (tiga) Pekerja Teladan Terbaik yang diusulkan oleh Daerah TK II se Jawa Timur.

Tahun Anggaran 1996/1997 terpilih 3 (tiga) orang Karyawan Teladan dari 3 (tiga) Perusahaan, PT Wing's Surya Surabaya, RSI Muhamaddiyah Bojonegoro dan PT. Perhutani Gresik.

3. Melaksanakan Lomba LKS Tripartit Dati II Teladan Jawa Timur.

Hasil yang dicapai telah terpilih 8 LKS Tripartit.

4. Menyelenggarakan Rakerda LKS Tripartit se Jawa Timur.  
 Hasil Rumusan Rakerda tersebut meliputi :
  - Meningkatkan Produktivitas, Kesejahteraan Tenaga Kerja dan agar terciptanya ketahanan perusahaan yang semakin mantap.
  - Mencegah timbulnya kegiatan Pemogokan / Unjuk rasa.
  - Memberikan saran dan masukkan serta usul kepada Pemerintah dalam pengambilan kebijaksanaan di bidang Ketenagakerjaan.
5. Pembuatan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu sebanyak 5.173 KKWT.
6. Pengawasan dan Pengurusan Persyaratan Kerja Perusahaan sebanyak 313 Peraturan Perusahaan.
7. Dalam Tahun Anggaran 1996/1997 Komisi Penelitian Pengupahan dan Jamsostek mengadakan sidang selama 25 kali, membahas tentang Usulan UMR dan penangguhan pelaksanaan UMR
8. Pada Tahun Anggaran 1996/1997 Perusahaan yang minta penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR):
  - Perusahaan yang karyawannya 500 orang berjumlah 1 perusahaan.
  - Perusahaan yang karyawannya kurang dari 500 orang berjumlah 14 Perusahaan.
  - 14 Perusahaan disetujui oleh Kantor Wilayah Prop. Jawa Timur, 1 Perusahaan diusulkan ke Pusat.
9. Pembinaan pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).  
 Tahun Anggaran 1996/1997 KKB di Jawa Timur sebanyak 173 KKB.
10. Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial ( UU No. 22/1957).
 

a. Jumlah Kasus	:	105 kasus.	
• Dapat diselesaikan	:	68 kasus	
Sisa	:	37 kasus.	(Lihat Lampiran 3)

b. Kasus PHK UU No. 12 / 1964

Jumlah Kasus masuk : 815 kasus

Jumlah Kasus diselesaikan : 433 kasus

Sisa Kasus : 382 kasus. (Lihat Lampiran4)

c. Kasus Pemogokan/Unjuk rasa.

Jumlah Kasus Masuk : 239 kasus melibat 118.341 orang (pekerja) dan Jam Kerja yang hilang 1.801.207 jam.

Tahun Anggaran 1995/1996 jumlah kasus 193 kasus hal ini berarti ada kenaikan 46 kasus (23,83 %)

Penyebab Pemogokan/Unjuk rasa adalah :

a. Tuntutan Normatif : 339 kasus.

b. Tuntutan Non Normatif : 428 kasus.

1. Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur sebanyak 27 kasus yang terdiri dari
  - Pengaduan yang ditujukan langsung ke Kantor Wilayah Depnaker Propinsi Jawa Timur sebanyak 16 kasus.
  - Yang sifatnya surat Tembusan ke Kantor Wilayah Depnaker Propinsi Jawa Timur, surat pengaduan tersebut diteruskan ke Kandepnaker yang dimaksud untuk dapat diselesaikan sebanyak 18 kasus, sedang sisa kasus yang belum diselesaikan sejumlah 9 kasus.
2. Kasus PO BOX 5000 yang diterima Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur sebanyak 24 kasus dan dapat diselesaikan 18 kasus, sisanya 6 kasus dalam proses penyelesaian.
3. Kasus Pengaduan Masyarakat melalui Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Tahun Anggaran 1996/1997 sebanyak 4 kasus dapat diselesaikan 2 kasus.
4. Pendataan peta kerawanan berkaitan dengan deteksi dini terhadap keresahan di Jawa Timur baru 9.594 perusahaan (38,14 %) dari jumlah perusahaan 25.149 perusahaan yang terdaftar.

Data Tingkat Kerawanan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Perusahaan dengan klasifikasi Merah (Rawan): 793 perusahaan
- b. Perusahaan dengan klasifikasi Kuning (setengah rawan) : 3.981 perusahaan.
- c. Perusahaan dengan klasifikasi Hijau (mantap): 4.910 perusahaan.

B. Kegiatan Pembangunan.

1. Proyek PHI dan PTK Jawa Timur dengan dana Rp. 217.779.000,- dengan Kegiatan sebagai berikut :
  - a. Perencanaan / penyusunan program di Malang dengan pe-serta dari Propinsi Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur dan Timor Timur.
  - b. Reformasi dan Rainsaksasi LKS Tripartit Dati I dengan hasil yang dicapai 6 produk hukum.
  - c. Pemilihan Pekerja Teladan menghasilkan 1 (satu) orang pekerja teladan dari PT. Wing Surya.
  - d. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Pekerja dan Pengusaha, telah mencapai hasil terbentuknya UK SPSI sejumlah 127, SPTP sejumlah 19 dan LKS Bipartit sejumlah 120.
  - e. Pemantauan Sistim Deteksi Dini pada perusahaan Rawan , pembinaan kepada tim Deteksi Dini TK II dan Perusahaan yang dikategorikan rawan terhadap ketenagakerjaan agar dapat diketahui sumber penyebab kerawanan.
  - f. Pembinaan Keluarga Pekerja Sejahtera, kegiatan ini merupa-kan kegiatan Pembinaan dan Evaluasi ke Daerah di Kandepnaker khususnya pada Unit Pengelolaan Keluarga Pekerja Sejahtera perusahaan serta mengadakan penilaian Lomba GPKPS dengan menghasil 6 perusahaan sebagai pemenang.
  - g. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) melalui penyuluhan PP/KKB. Memberikan penyuluhan kepada Perusahaan yang di klasifikasi rawan Ketenagakerjaan atau yang belum membuat PP/KKB kepada 100

perusahaan di 13 Wilayah Kandepnaker dengan hasil yang dicapai sebagai berikut :

- Pembuatan PP : 62 buah
- Pembuatan KKB : 24 buah

h. Pembinaan /Perbaikan Syarat - Syarat Kerja di BUMN/BUMD.

Wilayah binaan di Kandepnaker Malang, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan dan Madiun dengan sasarannya adalah perusahaan yang bergerak pada sektor Perhubungan dan Sektor Perkebunan sebanyak 30 Perusahaan.

Hasil yang dicapai :

- Perusahaan yang belum bersedia membuat PP bersedia membuat PP.
- Perusahaan yang semula belum mengikuti Jamsostek sanggup/bersedia mengikutinya.

i. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Pe-mutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pegawai Perantara.

Alokasi 100 perusahaan di 13 Kandepnaker yang tidak memperoleh Bagian Proyek dan kegiatan Pembinaan tatacara penyelesaian kepada 30 Perusahaan dengan maksud agar di dalam penyelesaian PHK sesuai dengan prosedur yang berlaku.

j. Evaluasi dan Analisa Data Pengupahan, Jamsostek dan Koperasi Karyawan. kegiatan ini untuk menganalisa/mengevaluasi di 900 perusahaan di 11 Kandepnaker dengan petugas survai Petugas Kandepnaker.

k. Mengadakan Evaluasi dan Analisa data dalam rangka Penetapan Peta Kerawanan Perusahaan sebanyak 556 perusahaan.

1. Klasifikasi Merah (Rawan) : 141 perusahaan
2. Klasifikasi Kuning (Setengah Rawan) : 236 perusahaan
3. Klasifikasi Hijau (Mantap) : 182 perusahaan

l. Bimbingan Teknis

Pelaksanaan Bimbingan Teknis dilaksanakan di Probolinggo, dengan peserta dari unsur Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah, jumlah peserta 60 orang.

Hasil yang dicapai bertambahnya pengetahuan tentang Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan.

- m. Bimbingan Teknis Aspek Kesejahteraan yang diikuti 40 orang peserta yang berasal dari Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.
- n. Bimbingan Teknis Penyuluhan PP/KKB dengan peserta terdiri dari unsur SPSI dan 10 Kandepnaker.

- Kegiatan PHI/PHK

- a. Bimbingan Teknis peserta terdiri dari Unsur SPSI dan Unsur dari perusahaan sebanyak 15 perusahaan, jumlah peserta 30 orang, setelah selesai mengikuti bimbingan teknis diharapkan para peserta dapat memahami dan selanjutnya menyebarluaskan tentang tatacara proses penyelesaian kasus PHI/PHK sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Penyelesaian kasus PHI/PHK ditingkat P4D Jawa Timur.

Target : 400 perkara

Selesai : 400 perkara

Dari 400 kasus dapat dirinci sebagai berikut :

- Sektor Industri Pengelolaan :

- Kasus PHK : 259 kasus

- Kasus PHI : 28 kasus

- Sektor Perdagangan besar, Eceran dan Rumah makan Hotel, kasus PHK : 46 kasus.

- Sedang sisanya 67 kasus tersebar pada sektor lainnya, sedang menurut daerah yang paling dominan adalah daerah Surabaya, Sidoarjo, Malang dan Gresik.

## 6. BIDANG PENGAWASAN DAN KESEHATAN KESELAMATAN KERJA.

### A. Kegiatan Rutin.

#### 1. Wajib Laport Ketenagakerjaan (UU. No 7/1981)

Berdasarkan UU. No 7 /1981, jumlah perusahaan yang telah terdaftar sampai dengan Bulan Maret 1997 adalah 26.066 perusahaan dengan tenaga kerja 1.523.120 orang. Dibandingkan dengan jumlah perusahaan pada Tahun Anggaran 1995/1996 jumlah perusahaan yang terdaftar 25.143 perusahaan, ini berarti mengalami kenaikan sebesar 3.67 %.

#### 2. Pemeriksaan.

Untuk mengawasi berlakunya peraturan Perundang - undangan Ketenagakerjaan selama Tahun Anggaran 1996/1997 telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap perusahaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebanyak 7.764 kali pemeriksaan. Dibandingkan Tahun Anggaran 1995/1996 pemeriksaan dilakukan sebanyak 8.135 kali, berarti mengalami penurunan 4,56 %. Hal tersebut dikarenakan aktivitas Pegawai Pengawas selain mengadakan pemeriksaan juga mengadakan penyuluhan. Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditemukan adanya pelanggaran sejumlah 4.217 kasus, kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran telah diadakan pembinaan.

Jumlah Berita Acara Projustitia yang dikeluarkan :

B A P Tahun Anggaran 1995/1996 : 17 buah

B A P Tahun Anggaran 1996/1997 : 12 buah

Penindakan terhadap pelanggaran tahun 1996/1997 mengalami penurunan 29,40% , hal ini disebabkan :

- Pembinaan yang secara aktif dan berkesinambungan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sehingga tumbuhnya kesadaran pihak perusahaan untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

3. Kecelakaan Kerja.

Kecelakaan Kerja yang terjadi dalam Tahun Anggaran 1996/1997 berjumlah : 1.722 (berdasarkan UU No. 3/1992). Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 1995/1996 jumlah kecelakaan kerja 2.452 ini berarti mengalami penurunan 29,77 % . Hal tersebut dikarenakan :

- Perusahaan mulai melaksanakan program - program K3 dengan baik.

4. Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Selama Tahun Anggaran 1996/1997 jumlah kepesertaan Jamsostek Jawa Timur sebesar 8.580 perusahaan dari jumlah perusahaan yang ada 26.066 perusahaan ini berarti hanya 32,92 % dan 1.372.865 orang Tenaga kerja dari jumlah tenaga kerja 1.523.120 orang Tenaga kerja (90,10 %). Kepesertaan Jamsostek diprioritaskan pada Perlindungan Tenaga Kerja.

- Jumlah Jaminan / Santunan yang telah diberikan kepada korban kecelakaan kerja yang terjadi oleh PT. Jamsostek (Persero) sebagai berikut :

- Berkala : Rp. 1.689.500,-
- Sekaligus : Rp. 311.512.566,28,-
- Biaya Lain : Rp. 161.676.290,-

5. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

Jumlah P2K3 naik 67 buah dari target pembentukan 330 buah. Kekurangan 70,70 % disebabkan Laporan Teknis pembentukan dari perusahaan belum dapat dilaporkan sedangkan pembentukannya sudah dilaksanakan. Dengan demikian jumlah P2K3 yang terbentuk hingga saat ini 2.409 unit.

6. Pelayanan Kesehatan Kerja, pengesyahannya menurun 19 buah.

Namun perusahaan baru yang melaksanakan bertambah, sedangkan beberapa perusahaan yang lama, belum memperbarui permohonan penyelenggaraan.

7. Pemberian Penghargaan terhadap perusahaan yang tidak mengalami kecelakaan (Zero Accident) dalam tahun ini 11 perusahaan atau bertambah untuk 2 perusahaan dari 1995/1996

8. Perijinan dibidang Keselamatan Kerja.

Perijinan dibidang Keselematan Kerja meliputi : Pesawat Uap, Bejana Tekan, Pesawat Angkat, Instalasi Listrik, Pemakaian Mesin Diesel dan Pengesyahan Instalasi Kebakaran yang umumnya mengalami kenaikan (Lihat Lampiran). Hal tersebut disebabkan adanya peningkatan Pegawai Spesialis (Uap, Mekanik, Listrik dan Kebakaran) dan semakin aktifnya pihak ke III untuk melakukan dan melaporkan hasil pemeriksaan serta ditunjang upaya penyelesaian di tingkat Kanwil yang semakin profesional. Jumlah perusahaan yang menggunakan pesawat/ bahan yang berbahaya se Jawa Timur dalam Tahun Anggaran 1996/1997 sebagai berikut

a. Pesawat Uap	: 4.533 perusahaan
b. Mesin Diesel	: 266 perusahaan
c. Listrik	: 198 perusahaan
d. Bahan berbahaya	: 10 perusahaan
e. Bejana Tekan	: 551 perusahaan
f. Radioaktif	: 275 perusahaan
g. Lift	: 364 perusahaan
h. Pesawat Angkat/Angkut	: 650 perusahaan

9. Pembinaan Pegawai Pengawas.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis Pegawai Pengawas telah dilaksanakan beberapa upaya antar lain :

- Pembinaan langsung ke Kandeptaker baik pembinaan teknis dan maupun pembinaan administratif.
- Dilaksanakan lokakarya untuk tahun 1996 - 1997, telah dilaksanakan 2 kali lokakarya yaitu pada bulan Nopember 1996. Lokakarya direncanakan akan dilaksanakan secara periodik setiap 4 bulan sekali dengan membahas 4 buah makalah (setiap kali kegiatan).

B. Kegiatan Pembangunan.

1. Proyek Pelatihan Keterampilan dan Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Jawa Timur Tahun Anggaran 1996/1997, kegiatannya meliputi :

- a. Pelatihan Kader Pelatih Fasilitator satu kali, target 25 orang realisasi 25 orang.
- b. Pelatihan Pelatih Pengelola TPA dan peningkatan penggunaan ASI satu kali, target 25 orang realisasi 27 orang, peserta dari LSM dan Yayasan.
- c. Pelatihan Kader Pelatih Keterampilan satu kali, target 25 orang realisasi 25 orang, peserta dari LSM dan Yayasan.
- d. Pelatihan Nakerwan Informal (Binawas), target 40 orang realisasi 40 orang, peserta dari Pengusaha informal.
- e. Pelatihan Nakerwan Informal (Binapenta), target 20 orang realisasi 20 orang, peserta Pengusaha informal.

2. Proyek PHI dan PTK.

Target dan Realisasi Kegiatan Proyek PHIPTK di Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 1996/1997 :

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Pembentukan Kader Norma Kertenagakerjaan di Tk Perusahaan.	270 Perush	270 Perush	100
2.	Penyuluhan Norma Perlindungan CTKI	1 Paket	1 Paket	100
3.	Cepat Tepat Norma Ketenagakerjaan	12 kali	12 kali	100
4.	Pencalonan dan evaluasi Ahli K3, Pembentukan P2K3	1 Paket/ 80 Perush	1 paket/ 80 Perush	100
5.	Pemeriksaan obyek Pengawasan K3	30 paket	30 paket	100
6.	Pemeriksaan Kasus Kecelakaan Kerja	30 paket	30 paket	100
7.	Penyediaan/pembuatan BAP	32 BAP	32 BAP	100
8.	Evaluasi dan Analisa Informasi K3	1 paket	1 paket	100
9.	Analisa data pengawasan Norma Kerja dan pemeriksaan kerja malam wanita	1 paket	1 paket	100
10.	Bimbingan Teknis Auditor K3	80 orang	80 orang	100
11.	Pemeriksaan kasus pelanggaran Norma Kerja	1.146 kasus	1.146 kasus	100

## 7. BALAI AKAN.

### 1. Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri.

Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja di Jawa Timur melalui program Ekspor Jasa Tenaga Kerja Luar Negeri (EJTKLN) pada Tahun Anggaran 1996/1997, mengalami kenaikan 46,06 % yaitu dari 24.610 orang menjadi 45.626 orang dibandingkan pada Tahun Anggaran 1995/1996. Hal ini disebabkan karena penyuluhan yang dilakukan oleh petugas sehingga kesadaran masyarakat makin meningkat dan informasi tentang keberhasilan para TKI yang mendorong timbulnya keinginan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidupnya melalui program EJTKLN.

### 2. Pembinaan Kepada Petugas Perwakilan PJTKI.

Melakukan pembinaan dan bimbingan secara periodik kepada petugas dari Kantor Perwakilan PJTKI, yang pada Tahun Anggaran 1996/1997 mengalami kenaikan 33,33 % yaitu dari 26 Perwakilan PJTKI menjadi 39 Perwakilan PJTKI dibandingkan pada Tahun Anggaran 1995/1996.

### 3. Pelatihan Pialang Tenaga Kerja.

Dengan meningkatnya animo masyarakat untuk turut serta dalam program EJTKLN dan mencegah adanya pengiriman CTKI ilegal maka melalui kegiatan Pembangunan diadakan kegiatan Pelatihan Pialang Tenaga Kerja yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Program Ekspor Jasa Tenaga Kerja Indonesia, yang pada Tahun Anggaran ini telah menyelesaikan 5 Angkatan dengan jumlah peserta 267 orang.

### 4. Pelatihan Pelaksana Penyedia Calon Tenaga Kerja Indonesia (PPCTKI)

Mengadakan pelatihan kepada Pelaksana Penyedia Calon Tenaga Kerja Indonesia (PPCTKI) kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan program EJTKI khususnya bagi petugas PJTKI. Dalam Tahun Anggaran 1996/1997 diadakan 8 angkatan dengan jumlah peserta 254 orang.

### 5. Petugas Penyuluh

Mengadakan Pelatihan sebagai Penyuluh Ekspor Jasa Tenaga Kerja Indonesia sebanyak 4 angkatan dengan jumlah peserta 120 orang, asal peserta dari instansi Depnaker dan Pemda TK II.

## 8. BALAI HIPERKES dan KESELAMATAN KERJA JAWA TIMUR.

### A. Kegiatan Rutin

Dalam rangka menciptakan kenyamanan dan Kesehatan Tenaga Kerja Balai Hiperkes melakukan kegiatan monitoring lingkungan yaitu :

1. Pengukuran Intensitas Kebisingan pada Tahun Anggaran 1996/1997 pada 91 perusahaan , dibandingkan dengan Tahun Anggaran 1995/1996 hanya 62 perusahaan ada peningkatan sebesar 31,52 %. Tahun Anggaran 1996/1997 jumlah lokasi 150 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 1995/1996 jumlah lokasi 350 ini berarti ada penurunan 57,14 %.  
Jumlah perusahaan Tahun Anggaran 1996/1997 yang melebihi ambang batas 51 perusahaan pada Tahun Anggaran 1995/1996 132 perusahaan dengan demikian ada penurunan sebesar 61,36 %.
2. Pengukuran Intensitas cahaya dilakukan terhadap 85 perusahaan, hal ini mengalami kenaikan 22 perusahaan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 1995/1996 63 perusahaan. Dari 85 perusahaan diadakan pengukuran intensitas cahaya pada 451 lokasi, sedang lokasi yang tidak sesuai dengan standarnya 36,59 % lokasi , hal ini berarti mengalami kenaikan 35,47 % dibandingkan dengan Tahun Anggaran 1995/1996 pada 291 Lokasi , 105 lokasi yang tidak memenuhi standart.
3. Pengukuran iklim kerja, pada 1996/1997 dilakukan terhadap 393 lokasi di 92 perusahaan , hal ini mengalami kenaikan 40,20 % yang dalam Tahun Anggaran 1995/1996 dilakukan terhadap 235 lokasi dari 93 perusahaan sedang lokasi yang tidak sesuai dengan nilai ambang batas turun , untuk Tahun Anggaran 1995/1996 48 lokasi sedang pada Tahun Anggaran 1996/1997 47 lokasi.

B. Kegiatan Pembangunan.

1. Kegiatan Pengembangan Hygiene dan Kesehatan Kerja.
  - a. Pengujian Tingkat Kebisingan  
Pengujian Tingkat kebisingan telah dicapai 100 %
  - b. Pengujian iklim kerja  
Pengujian iklim kerja telah selesai sesuai dengan rencana dan telah mencapai sesuai dengan target 100 %
  - c. Pengujian Gizi kerja
  - d. Pengujian tingkat pencerangan  
Pengujian Tingkat pencerangan telah mencapai 100 %
  - e. Pemeriksaan Audio meter, telah mencapai 100 %
  - f. Pemeriksaan pengaruh Prinsip Ergonomi, telah mencapai 100 %
  - h. Pengujian Pengaruh debu terhadap pernafasan
  - i. Pemeriksaan Kesehatan Kerja
  - j. Pemeriksaan Pengamatan Kondisi Kerja
  - k. Penyuluhan Hiperkes, Ergonomi dan Keselamatan Kerja
  - h. Pengujian Pengaruh Fakto Kimia
2. Kegiatan Produktivitas Tenaga Kerja Wanita Terpadu, kegiatan ini meliputi :
  - a. Pemeriksaan Kesehatan
  - b. Pemeriksaan
  - c. Pemeriksaan Kadar HB Darah
  - d. Wawancara
  - e. Pengukuran Intensitas Kebisingan
  - f. Pengukuran Iklim Kerja setempat
  - g. Pengukuran Intensitas Pencahayaan
3. Kegiatan Pembangunan Prasarana Fisik
  - a. Perbaikan Prasana Lingkungan
    - Pembuatan Pagar halaman depan
    - Pembuatan Papan Nama Kantor

- b. Rehabilitasi Gedung Kantor.
  - Penggantian Lantai
  - Rehabilitasi Gedung

## 9. KEPANITERAAN P4D

### A. Kepaniteraan Perkara

Penanganan masalah/perkara :

- Menurut UU No 22 / 1957.

Sisa Perkara s/d akhir Bulan Maret 1996	:	8 perkara
Perkara yang masuk sampai dengan Maret 1997	:	23 perkara
Jumlah	:	31 perkara
Perkara yang diputus/diselesaikan s/d Maret 1997	:	29 perkara
Sisa Perkara s/d Bulan Maret 1997	:	2 perkara

- Menurut UU No 12/ 1964

Sisa perkara s/d akhir Bulan Maret 1996	:	53 perkara, 61 TK
Perkara yang masuk s/d sampai dengan Maret 1997	:	380 perkara, 447 TK
Jumlah	:	433 perkara, 538 TK
Perkara yang diputus/diselesaikan s/d Maret 1997	:	379 perkara, 452 TK
Jumlah	:	62 perkara, 86 TK

Perkara yang masuk ke persidangan (UU No. 12/ 1964)

#### a. Menurut Daerahnya

■ Surabaya	:	92 kasus,	121 Tenaga Kerja
■ Mojokerto	:	26 kasus,	26 Tenaga Kerja
■ Malang	:	65 kasus,	81 Tenaga Kerja
■ Pasuruan	:	7 kasus,	8 Tenaga Kerja
■ Kediri	:	3 kasus,	3 Tenaga Kerja
■ Madiun	:	16 kasus,	21 Tenaga Kerja
■ Bojonegoro	:	3 kasus,	3 Tenaga Kerja
■ Pamekasan	:	10 kasus,	10 Tenaga Kerja

■ Tuban	:	5 kasus,	5 Tenaga Kerja
■ Gresik	:	50 kasus,	51 Tenaga Kerja
■ Tulungagung	:	1 kasus,	1 Tenaga Kerja
■ Sidoarjo	:	20 kasus,	75 Tenaga Kerja
■ Probolinggo	:	15 kasus,	15 Tenaga Kerja

b. Menurut Sektor Usahanya.

1. Sektor Pertanian Peternakan Kehutanan dan

Perkebunan dan Perikanan : 3 kasus, 3 TK

2. Sektor Pertambangan dan Penggalan : -- kasus, -- TK

3. Sektor Industri Pengolahan : 274 kasus, 349 TK

4. Sektor Listrik, Gas dan Air : -- kasus, -- TK

5. Sektor Bangunan : 15 kasus, 17 TK

6. Sektor Perdagangan besar, eceran dan

Rumah Makan serta hotel

7. Sektor Angkutan, Pergudangan dan

Komunikasi.

8. Sektor Keuangan, Asuransi, Usaha persewa-

an Bangunan tanah dan jasa perusahaan.

9. Sektor Jasa Kemasyarakatan sosial dan

Perorangan.

10. Sektor Kegiatan lain yang belum jelas batas-

nya.

c. Penyebab PHK dari kasus yang telah diputus.

1. Menejemen : 42 perkara, 75 TK

2. Kontrak selesai : 10 perkara, 15 TK

3. Indisipliner : 223 perkara, 234 TK

4. Lain-lain : 96 perkara, 118 TK

d. Kegiatan Lain

1. Pertemuan teknis di Batu Malang pada Bulan Mei 1996

2. Pertemuan teknis anggota dan panitera di Malang, bulan Desember 1996

3. Study Bandung P4D di Bandung Jawa Barat.

10. **BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH (BPPD).**

A. Kegiatan Rutin

Dalam Tahun Anggaran 1996/1997 mengadakan Pelatihan Manajemen dan motivasi produktivitas 2 kelompok dengan jumlah peserta 50 orang dan Pelatihan Supervisi 3 kelompok dengan jumlah peserta 75 orang.

B. Kegiatan Pembangunan.

1. Pelatihan Non Pegawai Negeri

- a. Mengadakan Pelatihan Produktivitas 10 Klmp : 250 orang.
- b. Menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Usaha 2 Klmp: 50 org
- c. Mengadakan Pelatihan AMT terhadap 2 kelompok : 50 orang

2. Pembinaan Kelembagaan.

- b. Mengadakan Pembinaan Kelembagaan Produksi : 20 perusahaan
- c. Mengadakan Pembinaan Desa Produktivitas di 10 Desa, masing - masing Desa 4 kali Pembinaan.

3. Study Kebijakan Produktivitas.

- a. Mengadakan Pengukuran Produktivitas Perusahaan di 8 Perusahaan.
- b. Mengadakan Pengukuran Produktivitas Individu.

4. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Manajemen konsultasi di 50 Persh

5. Bimbingan Teknis diselenggarakan sebanyak 1 paket.

### BAB III

#### PERMASALAHAN / HAMBATAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan baik Rutin/Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 di jajaran Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur masih menghadapi beberapa hambatan/permasalahan. Hambatan dan permasalahan yang ada kaitanya dengan keterbatasan personil terutama kualitasnya, sarana dan fasilitas yang masih mewarnai dalam program dan kegiatan. Namun demikian hal tersebut secara intensif diupayakan pemecahanya semaksimal mungkin.

Permasalahan dan hambatan yang perlu diutarakan antara lain sebagai berikut :

1. Bagian Ketatausahaan.

- a. Ketepatan dan kecepatan surat menyurat, maupun laporan yang masih belum memenuhi harapan khususnya surat-surat yang ada hubungannya dengan pihak ke III yang masuk sering terlambat sehingga pelayannya sering terlambat.
- b. Alokasi personil baik staf maupun pejabat fungsional masih perlu adanya penataan yang baik, sehubungan dengan beberapa hal antara lain :
  1. Beberapa kegiatan yang urgen/penting yang harus ditangani oleh pegawai/staf yang berkualitas.
  2. Adanya perkembangan dan kemajuan yang terjadi disuatu daerah Tk II.
  3. Rencana dan pelaksanaan Reformasi dan Restrukturisasi BLK/KLK.
  4. Pelaksanaan OTODA Tk II.

2. Bidang Binagram

Perolehan dukungan data dari Instansi lain yang berkaitan dengan penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja masih sangat sulit dan lamban.

### 3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas.

- Informasi tentang kebutuhan latihan diberbagai sektor sulit diperoleh, sehingga pelatihan di BLIK/KLK/LLS dan Pondok Pensantren belum sepenuhnya mengacu pada bidang jabatan yang ada.
- Pelatihan yang dilaksanakan oleh BLK/KLK/Ponpes masih bersifat dasar sehingga hasil latihan sulit untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang ada. Untuk itu Lembaga Latihan utamanya perusahaan perlu mengadakan latihan lanjutan.
- Masih rendahnya tingkat kesadaran dari pihak pengusaha akan arti pentingnya program peningkatan produktivitas maupun program kegiatan pelatihan termasuk pemagangan.

### 3. Bidang Penta Kerja.

- Mekanisme Pasar Kerja dalam masyarakat belum berfungsi sepenuhnya karena sebagian besar perusahaan belum menyadari dan mentaati Wajib Lapor Lowongan sesuai dengan Keppres No 4/ 1980, meskipun upaya penyuluhan dan pengawasan secara terus menerus dilakukan.
- Masih kurangnya dukungan dari sebagian pimpinan Lembaga / Unit tempat berdirinya BKK sehingga kesulitan dalam operasional , terutama modal awal. Ada beberapa Lembaga/Unit yang petugasnya telah dilatih , namun BKK belum dapat berfungsi sebagaimana petunjuk yang ada.
- Banyak pencari kerja atau calon pencari kerja yang belum me-mahami tentang potensi diri dan persyaratan jabatan yang ada sehingga bilamana memasuki dunia kerja tidak dapat kesesuaian antara kemampuan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- Kegiatan Proyek PLKPP Tahun Anggaran 1996 / 1997 Propinsi Jawa Timur masih ditemukan kendala antara lain :
  - Pengadaan kendaraan roda empat dan dua, Pembinaan TKPMP/TKMT/BMT diblokir.
  - Pembinaan / pembentukan PMP bank dunia yang dianggarkan dengan sharing RK/RU belum bisa direalisasi dan direcheduling.
  - Petugas lapangan (PL) yang telah dikursus sebagai PL/TOT banyak yang dimutasi kelain seksi penta kerja.

- Dalam pelaksanaan kegiatan Antar Kerja Antar Negara :
  1. Masih banyak TKI ilegal yang diberangkatkan oleh para calo ke negara Malaysia dengan mempergunakan visa kunjungan.
  2. Pemberangkatan TKI ke negara Timur Tengah masih dipusatkan di Jakarta, sehingga proses desentralisasi sebagaimana Permen maupun Kepmenaker belum berjalan sebagaimana mestinya.
  3. Masih ada penampungan calon TKI yang belum memenuhi standart yang ketentuan yang berlaku.
- 4. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat - Syarat Kerja.
  - a. Dibidang Hubungan Industrial hingga saat ini masih diwarnai dengan adanya kendala ataupun hambatan sebagaimana tahun yang lalu :
    - ✓ 1. Masih ditemui sebagaian pengusaha yang belum memahami dan menerapkan dengan penuh kesadaran prinsip-prinsip HIP.
    - ✓ 2. Tingkat pengetahuan dan kemampuan sebagian besar pengurus Unit Kerja SPSI/SPTP/Pekerja masih cukup rendah, utamanya dalam hal :
      - Hak dan Kewajiban serta syarat-syarat kerja.
      - Biroganisasi bernegosiasi.
      - Pemberian dan peningkatan kesejahteraan para anggota.
    - ✓ 3. Tumbuh kembangnya LSM ataupun Forum-Forum yang bergerak dibidang Ketenagakerjaan / Perburuhan yang belum cukup terbina dan terarahkan secara baik.
  - ✗ b. Tingkat penyelenggaraan diklat dan penyuluhan bagi pegawai peran-tara masih relatif kurang. Disamping itu pula perubahan kariir pegawai perantara belum cukup jelas.
- 5. Bidang Pengawas Ketenagakerjaan.
  1. Sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan dunia usaha pada umumnya dan sektor industri , maka belum semua perusahaan/tempat kerja terdaftar dan terpantau.
  2. Kelancaran proses Berita Acara prajustitia yang tidak sampai pada sidang pengadilan, mengingat kasus tersebut dinformasikan kedalu-warsa oleh pihak Kejaksaan.
  3. Keberadaan Ahli K3 dan dokter pemeriksa Badan Tenaga Kerja Perusahaan relatif masih sedikit.

4. Kurang tajamnya pengamatan dan analisa pegawai pengawas terhadap hal-hal yang ada dilapangan yang seharusnya dilaporkan.
5. Masih dirasakan kurang profesionalismenya petugas pengawas sehingga fungsionalisasi belum berjalan sebagaimana diharapkan.

DISPERPUSIP JATIM

## BAB IV

### ANALISA DAN EVALUASI

#### 1. Bagian Tata Usaha.

- a. Tugas dan fungsi jajaran Tata Usaha sebagai Unit pendukung Bidang dan kegiatan teknis dari waktu-waktu menunjukkan peningkatan. Hal tersebut terlihat dari :
  - Peningkatan jumlah surat yang masuk dan keluar.
  - Pemenuhan terhadap permintaan yang mendesak baik dari pusat maupun instansi terkait.
  - Tertibnya penyelenggaraan dan pelaporan Rapim dan Raker.
  - Penyelesaian Angka Kredit mengalami kenaikan, karena ada tindakan tegas terhadap mereka yang tidak segera menyelesaikan Angka Kredit.
- b. Pembinaan personil dan lingkungan kerja menjadi semakin baik walau-pun beberapa hal perlu diperhatikan :
  - Penyelenggaran apel pagi tepat waktu , namun belum dapat diikuti oleh semua pegawai hal ini berarti tingkat kedisiplinan pegawai belum merata.
  - Tingkat hukuman disiplin secara kuantitatif dan kualitatif meningkat, hal ini berarti disiplin pegawai menurun.
  - Mutasi / pemindahan personil yang indiscipliner.
- c. Kemajuan dan peningkatan tersebut pada huruf a dan b diatas sangat dimungkinkan karena upaya-upaya penyempurnaan antara lain pada bidang surat-menyurat, mengaktifkan tim-tim baku yang ada (tim penilai Angka Kredit, Tim Tindak Lanjut, Tim Wasmin/ Wasop). Sedangkan untuk kedisiplinan pegawai pegawai akan ditingkatkan untuk menciptakan kebersamaan.

#### 2. Bidang Binagram.

- a. Meskipun akurasi dan kecepatan, ketepatan laporan dan informasi baik dari intern jajaran Kanwil Depnaker maupun dari instansi lain masih merupakan kendala yang

perlu di tindaklanjuti dan ditingkatkankan , akan tetapi selama T.A. 1996/1997 telah mampu diatasi.

- b. Dalam rangka pembentukan dan penyusunan RTKD Tk I baik untuk Pelita VI maupun PJP ke II sangat tergantung peran serta dan keterlibatan secara aktif berbagai instansi dan sektor. Disamping itu pedoman -pedoman dari pusat yang dalam hal tertentu mengalami perubahan-perubahan, tidak jarang menimbulkan kesulitan dalam proses penyusunannya. Namun demikian RTKD dimaksud telah dapat diselesaikan dengan lebih baik.
  - c. Mekanisme dan proses penyusunan DUP, DUK dan Renlakgiat semakin lebih baik dan tepat waktu. Hal tersebut sangat dimungkinkan karena pertemuan-pertemuan konsolidasi perbidang dilakukan lebih sering dan lebih dini, meskipun proses perencanaan bottom up belum berjalan.
3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas
- a. Pendirian Lembaga Latihan Suasta meningkat 12,32 % dibanding Tahun Anggaran 1995/1996, Lembaga Latihan Suasta Tahun Anggaran 1996/1997 sebanyak
  - b. Kesadaran LLS untuk mengevaluasi latihan dan ujian lokal Ketrampilan semakin tinggi dan jumlahnya pun makin meningkat dibanding dengan tahun lalu Tahun Anggaran 1995/1996. Pemegang sertifikat sebanyak 36.725 orang Tahun Anggaran 1995/1996 30.726 ini berarti ada penurunan sebesar 16,33 %.
  - c. Dalam rangka memperluas informasi pelatihan kepada masyarakat telah diadakan training Expo dan penyebarluasan melalui brosur, liflet dan lain-lain.
  - d. Pembinaan terhadap produktivitas tenaga kerja T.A. 1996/1997 mengalami peningkatan dan penyuluhan usaha mandiri di berikan paket AMT.
  - e. Guna meningkatkan kualitas pelatihan maka diadakan pembinaan terhadap instruktur antara lain melalui OJT, TOT dan sekolah Jenjang S1.
  - f. Pembinaan terhadap BLK/KLK/BPPD sudah sangat intensif walau-pun hasilnya belum memuaskan. Hal tersebut disebabkan beberapa kendala, upaya untuk mengatasi masalah yang timbul antara lain :
    - Optimalisasi kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka pelaksanaan pelatihan pemagangan dan penempatan.

- Optimalisasi penyebaran informasi pelatihan keseluruh lapisan masyarakat di daerah melalui mass media cetak maupun elektronika.
- Optimalisasi fungsionalisasi IPK dan BKK yang dimiliki oleh LLS, perusahaan dan lembaga pendidikan formal dalam program.
- Optimalisasi fungsionalisasi terhadap penyelenggaraan latihan terutama di perusahaan dan Lembaga Latihan Suasta untuk menyusun suatu program pelatihan tingkat madya utama

#### 4. Bidang Penta Kerja.

##### Kegiatan Penempatan dan Penyaluran Tenaga Kerja :

- a. Jumlah penempatan dibanding T.A. 1995/1996 mengalami kenaikan sebesar 15.337 orang atau 28,14 % , sedangkan jumlah lowongan terdaftar dibanding T.A. 1995/1996 mengalami kenaikan sebesar 21.964 orang atau 22,09 % . Dalam hal penempatan dan penyaluran tenaga kerja masih dipenuhi adanya kesenjangan struktural, dalam pasar kerja dimana sejumlah lowongan 29.576 orang tidak dapat diisi oleh para pencari kerja disebabkan adanya perbedaan antara persyaratan jabatan dengan kualifikasi dan aspirasi pencari kerja.
- b. Program penyuluhan jabatan masih perlu ditingkatkan dan terus dilaksanakan terbukti dari hasil penyuluhan bimbingan jabatan dapat meningkatkan penempatan secara tepat dan cepat pada dunia kerja.
- c. Wilayah Jawa Timur adalah merupakan daerah potensial Calon TKI program AKAN Target pengiriman TKI dalam T.A. 1996/1997 telah dapat dicapai 46,63 % yaitu 45.626 orang atau mengalami kenaikan 46,06 % dari Tahun sebelumnya. Upaya untuk meningkatkan pengiriman CTKI karena Jawa Timur merupakan daerah potensial maka pengiriman melalui Surabaya perlu ada pemikiran.
- d. Bursa Tenaga Kerja, keberadaan bursa tenaga kerja perlu di-pikirkan hal tersebut terbukti adanya bursa tenaga kerja dapat membantu penempatan para pencari kerja. Untuk itu pembinaan perlu ditingkatkan dan dilaksanakan secara berlanjut.
- e. Untuk T.A. 1996/1997 TKPMP - BMT dapat menyerap 350 orang dari target yang ditentukan yakni 97 orang berarti ada kelebihan target 72,29 %.

#### f. Pembinaan Ketenagakerjaan.

Kegiatan TKPMP T.A. 1996/1997 dengan dana yang tersedia dapat menyelesaikan kegiatan kampanye pendaftaran dan seleksi pada 450 orang, pembinaan terhadap TKPMP andalan sebanyak 38 orang dan setelah diseleksi 1 (satu) orang ditetapkan sebagai tenaga TKPMP andalan

Pelatihan TKPMP PT untuk T.A. 1996/1997 dapat direalisasikan dan bekerja sama dengan ITN Malang jumlah peserta 220 orang.

Pembinaan dan Evaluasi TKMT A.1. 120 Orang dan TKMT A.2 120 orang, kedua angkatan tersebut telah memperoleh sertifikat dan kepada yang bersangkutan diberikan perlengkapan kerja.

Penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah dalam negeri dapat menyerap 15.563 orang, melebihi target yang ditentukan yaitu 15.500 orang, sedangkan penempatan melalui AKI sebesar 13.350 orang sesuai dengan target yang ditentukan.

#### 5. Bidang Hubin Syaker.

- Secara garis besar dinilai bahwa kondisi Hubungan Industrial di Jawa Timur cukup aman dan terkendali. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penurunan kasus yang masuk pemogokan/unjuk rasa pekerja dan kecilnya angka perusahaan yang mengajukan penangguhan pelaksanaan UMR.
- Pembentukan sarana HIP khususnya UK SPSI belum dapat men-capai target 100 %, namun demikian bila dibandingkan dengan T.A. 1995/1996 telah menunjukkan angka yang berarti.
- Penyebab pemogokan/unjuk rasa T.A. 1996/1997 ini telah bergeser dari hal-hal bersifat normatif bergeser kearah yang bersifat non normatif atau hal yang bersifat kepentingan. Diidentifikasi adanya perselisihan pekerja/pemogokan atau Unjuk rasa yang penyelesaiannya berlarut, sulit dan meluas dikarenakan (dipikirkan) adanya pengaruh keterlibatan pihak ke III. Dalam penanggulangan gejolak ketenagakerjaan, keterlibatan instansi dan aparat yang terkait cukup terbina dan selalu diupayakan peningkatannya, sehingga gejolak/unjuk rasa pekerja dengan cepat dan terkoordinir.

6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.

- a. Dengan semakin tumbuh dan berkembangnya dunia usaha pada umumnya dan sektor industri pada khususnya merupakan tantangan tersendiri bagi jajaran pengawasan untuk lebih memperluas jangkauan pengawasan/pemeriksaan yang telah ada selama ini. Jangkauan pengawasan dalam T.A. 1996/1997 telah mengalami peningkatan 7,76 % termasuk pembuatan laporannya. Namun demikian target pemeriksaan pegawai pengawas belum tercapai sepenuhnya.
- b. Dengan peningkatan intensitas pengawasan yang dilakukan telah sedikit banyak memberikan warna dan perubahan pada kondisi penerapan kebutuhan peraturan perundangan-undang-an. Namun demikian masih terdapat pula perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku sebagai akibat kurangnya kesadaran dan untuk beberapa kasus dikarenakan kondisi usahanya yang kurang menguntungkan, sehubungan dengan itu upaya pembinaan dan penegakan hukum/penyidikan harus diupayakan, walaupun jumlahnya menurun bila dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam hal pengajuan kasus ke Pengadilan masih belum cukup lancar, dan untuk itu pula kerja sama dan koordinasi khususnya dengan pihak kepolisian dan Kejaksaan tetap diupayakan.
- c. Perlindungan tenaga kerja atas Jamsostek telah diupayakan dan hasilnya pun cukup meningkat dimana sampai dengan bulan Maret tahun 1997, target 8.580 perusahaan dari 26.066 perusahaan ( 32,92 % ) dan 1.372.865 orang tenaga kerja dari target 1.523.120 orang ( 90 % ) . Selain itu untuk penambahan kepersetaan perusahaan Wajib Belum Daftar melalui bentuk program kerja sama operasional (KSO) sejumlah 2.582 baru tercapai 252 ( 10 % ) dengan jumlah tenaga kerja 6.938 orang. Hal tersebut disebabkan antara lain : kurang monitoring langsung, tunggakan premi iuran jamsostek dsb.
- d. Intesitas pengawasan meningkat dan ternyata dapat memberikan warna dan perubahan pada kondisi penerapan kebutuhan peraturan perundang-undangan. Namun demikian beberapa perusahaan masih banyak juga yang kurang /tidak mematuhi peraturan perundangan-undangan Ketenagakerjaan yang ada. Hal tersebut disebabkan kurang kesadarannya dari para pengusaha. Pembinaan terus

ditingkatkan demikian juga penegakan hukum/penyidikan jumlah pelanggaran kasus menurun dibanding tahun yang lalu. Dalam penyelesaian kasus perlu kerjasama dengan pihak instansi terkait sehingga pencapaian kasus ke Pengadilan tidak tersendat-sendat.

DISPERPUSIP JATIM

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN.

1. Jajaran Ketata Usahaan dalam pelaksanaannya tugas dan fungsi sebagai unsur penunjang operasional bidang teknis semakin lebih meningkat. Hal tersebut dalam sistim surat menyurat , kebersihan dan keindahan bangunan dan lingkungan. Walaupun demikian masih diakui bahwa upaya perlu ditingkatkan.
2. Meskipun masih terdapat kendala / hambatan didalam pembinaan rencana dan program namun dalam T.A. 1996/1997 telah banyak kemajuan yang telah dicapai dalam penyusunan DUP, DRUK, DUK dan Renlakgiat maupun dalam penyusunan RTKD.
3. Target dibidang pelatihan dan produktivitas telah dapat dicapai dengan baik disamping itu mulai nampak keterlibatan dan peran serta pihak ke III semakin meningkat pelatihan mengacu pada penempatan masih sulit untuk dilaksanakan khususnya pelatihan ditingkat medle dan tingkat hight.
4. Kegiatan dan program yang berkaitan antar kerja, TKPMP, TKMT secara umum lebih baik dari pada tahun sebelumnya dan telah mencapai target yang ditentukan. Khususnya penyaluran Tenaga Kerja ke luar negeri melalui program AKAN menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi dibanding T.A. 1995/1996.
5. Kondisi Hubungan Industrial dinilai di Jawa Timur cukup aman dan terkendali walaupun diwarnai dengan unjuk rasa pekerja.

Penyebab unjuk rasa telah mengalami pergeseran dari hal-hal yang bersifat Normatif ke hal-hal yang bersifat non Normatif /yang bersifat kepentingan. Maraknya unjuk rasa di Jawa Timur diidentifikasi adanya campur tangan pihak ke III dengan motif-motif tertentu. Dalam penanggulangan kasus ini diperlukan koordinasi dengan instansi terkait.

- Peningkatan disiplin dan kualitas pegawai pengawas dengan ber-bagai forum pertemuan secara rutin.
  - Evaluasi hasil kegiatan pemeriksaan peningkatan kondisi tersebut mempengaruhi ketaatan para pengusaha untuk melaksanakan ketentuan dan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan hak dasar pekerja. Namun demikian masih adanya penyimpangan yang disebabkan dari pihak pengusaha.
7. Secara umum kegiatan rutin maupun pembangunan dapat berlangsung secara baik dan lancar dan dapat mencapai target yang ditentukan.

#### B. S A R A N.

1. Agar dapat ditingkatkan penyelenggaraan diklat / penyuluhan khusus-nya bagi para pejabat fungsional, demikian pula pola pembinaan kariernya.
2. Agar plotting/alokasi anggaran baik rutin maupun pembangunan lebih proporsional sesuai usulan.
3. Agar kiranya Surabaya dapat ditetapkan sebagai tempat pemberang-katan TKI ke luar negeri khususnya ke Wilayah Timur Tengah dalam rangka meringankan beban bagi para calon.
4. Perlu pengaturan tentang pengorganisasian di bidang pengawasan sehubungan dengan pelaksanaan Otda Dati II.

Surabaya, April 1997

KANWIL DEPNAKER PROPINSI JAWA TIMUR

Lamp. 1: PEREMBANGAN PROSENTASE HASIL KEGIATAN PENDIDIKAN P4 HIP

No.	KANDAPRAER	JUMLAH PERUSAHAAN TK > 25	KOMULATIF s/d 31-3-96		TAHUN 1996/1997		KOMULATIF s/d 31-3-97	KEMISKINAN %	PESERTA	KETERANGAN
			4	5	T	R				
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	KANTOR WILAYAH	-	9	1	-	-	9	-	154	
2.	SURABAYA	2.600	27	4	-	-	31	-	2.392	
3.	GRESIK	325	13	1	-	-	14	-	1.189	
4.	SIDARJO	730	15	3	-	-	18	-	1.200	
5.	MALANG	582	66	2	-	100	66	143	2.484	
6.	KOTA BAYU	192	10	3	-	-	13	-	2.232	
7.	PASURUAN	113	14	10	3	500	14	500	1.507	
8.	JOMBANG	122	-	4	1	50	4	-	196	
9.	VEMBER	458	4	1	1	50	5	-	114	
10.	ADIK	152	15	2	1	100	16	-	976	
11.	BAYUNANGI	169	-	1	-	-	-	-	-	
12.	KEDIRI	169	86	2	34	100	88	21	19.627	
13.	PROGLINGGO	152	5	3	-	-	8	-	698	
14.	TULUNGAGUNG	172	7	4	-	-	11	-	34	
15.	PALEMBAN	56	1	1	-	-	2	-	39	
16.	BOJONEGRO	28	18	1	3	15	21	17	4.137	
17.	BITAR	110	1	1	-	-	2	-	-	
18.	BANGALAN	34	1	1	-	-	2	-	-	
19.	LIPAJANG	84	160	1	-	-	161	-	6.650	
20.	SITUBONDO	61	20	1	-	-	21	-	99	
21.	SUMENEP	31	73	1	-	-	74	-	1.043	
22.	NGANJUK	75	1	1	-	-	2	-	72	
23.	PONOROGO	38	3	1	-	-	4	-	197	
24.	TUBAN	91	3	1	1	100	4	13	130	
25.	PACITAN	13	23	1	24	2.400	27	100	4.436	
	J U M L A H	6.920	562	45	100	202.12	660	17	56.596	



Lamp. 3 : DATA PENYERAIAN KASUS PHH (UU. 22/1957)  
 PERIODE : 1996/1997

No.	KANDIDAT/REGISTRASI	SISA KASUS 1996/1997	KASUS MASUK 1996/1997	JUMLAH KASUS	PENYERAIAN		SISA KASUS 1996/1997	PELAKSANA
					RE PAK	JMIR		
1.	SURABAYA	20	19	20	1	14	25	1
2.	MALANG	10	10	10	1	1	1	1
3.	KEDIRI	10	10	10	1	1	1	1
4.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
5.	PAVITAS	10	10	10	1	1	1	1
6.	LIWANG	10	10	10	1	1	1	1
7.	BANYUWANG	10	10	10	1	1	1	1
8.	PASURUAN	10	10	10	1	1	1	1
9.	MUSKIR	10	10	10	1	1	1	1
10.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
11.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
12.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
13.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
14.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
15.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
16.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
17.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
18.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
19.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
20.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
21.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
22.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
23.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
24.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
25.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
26.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
27.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
28.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
29.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
30.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
31.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
32.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
33.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
34.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
35.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
36.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
37.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
38.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
39.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
40.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
41.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
42.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
43.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
44.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
45.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
46.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
47.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
48.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
49.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
50.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
51.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
52.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
53.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
54.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
55.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
56.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
57.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
58.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
59.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
60.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
61.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
62.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
63.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
64.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
65.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
66.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
67.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
68.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
69.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
70.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
71.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
72.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
73.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
74.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
75.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
76.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
77.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
78.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
79.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
80.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
81.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
82.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
83.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
84.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
85.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
86.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
87.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
88.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
89.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
90.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
91.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
92.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
93.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
94.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
95.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
96.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
97.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
98.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
99.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
100.	BOJONEGORO	10	10	10	1	1	1	1
J U M L A H		24	73	105	11	69	30	
P R O S E S A N								50,76

KETERANGAN : JL = JUMLAH KASUS  
 R = RUGI

Lamp. 4 : DATA TELEVISI KASUS INK ( 031 12/1964 )  
 PERIODE : 1996 / 1997

KATEGORI / DISNAKER	JASA TELEVISI 1996/1997	JASA KASUS 1996/1997	TELEVISI KASUS		JMLH	NO P4D	JASA KASUS 1996/1997	FELAFORAN
			TELEVISI	TELEVISI				
SURABAYA	253	428	102	102	102	100	100	
MALANG	1	100	100	100	100	100	100	
KEDIRI	1	100	100	100	100	100	100	
MADIUN	1	100	100	100	100	100	100	
JEMBER	1	100	100	100	100	100	100	
BONINGIRO	1	100	100	100	100	100	100	
PAMEKASAN	1	100	100	100	100	100	100	
BLITAR	1	100	100	100	100	100	100	
BANYUWANGI	1	100	100	100	100	100	100	
PASURUAN	1	100	100	100	100	100	100	
MOKERTO	1	100	100	100	100	100	100	
SURABAYA	58	100	100	100	100	100	100	
JOMBANG	1	100	100	100	100	100	100	
PROBOLINGGO	1	100	100	100	100	100	100	
BOJONEgara	1	100	100	100	100	100	100	
Surabaya	1	100	100	100	100	100	100	
TOLONGAGUNG	1	100	100	100	100	100	100	
NGANJUK	1	100	100	100	100	100	100	
PONOROGO	1	100	100	100	100	100	100	
GRESIA	1	100	100	100	100	100	100	
TUBAN	1	100	100	100	100	100	100	
BANGKALAN	1	100	100	100	100	100	100	
SURABAYA	1	100	100	100	100	100	100	
SURABAYA	1	100	100	100	100	100	100	
PACITAN	1	100	100	100	100	100	100	
JUMLAH	350	455	350	350	350	350	350	
PERSENTASE								

KETERANGAN : TL : TIDAK LAPOR  
 R : RUTIN  
 \*) : DATA HURANG AKURAT